

Mahasiswa ITB Ciptakan Pendeteksi Stres dan Depresi Hanya Pakai Urine

Alat ini diciptakan mahasiswa ITB yang tergabung dalam kelompok Pekan Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta, dan diberi nama Depression Test.

JAKARTA (IM) - Saat pandemi tingkat stres di masyarakat meningkat. Bahkan beberapa di antaranya cenderung mengarah ke depresi. Inilah sebabnya mengapa stres perlu dideteksi agar bisa ditangani sedini mungkin.

Nah, kabar baiknya mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil membuat alat pendeteksi stres dan depresi dengan menggunakan urine atau air kencing.

Alat ini diciptakan mahasiswa ITB yang tergabung dalam kelompok Pekan Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta, dan diberi nama Depression Test.

Kelompok ini terdiri dari

mahasiswa angkatan 2019, diketuai oleh mahasiswa jurusan biologi, Maha Yudha Samawi dan beranggotakan mahasiswa Teknik Biomedis, Alifia Zahratul Ilmiah, dan mahasiswa Teknik Material, Gardin Muhammad Andika.

Gardin menjelaskan, bahwa orang yang mengalami stres pastinya akan mengalami perubahan konsentrasi pada beberapa zat dalam urine.

"Jadi kami memanfaatkan fase ini. Karena senyawa-senyawanya mengalami perubahan karakter spesifik kalau sudah dikasih sinyal. Dari sana, kami bisa mendeteksi orang yang mengikuti percobaan ini sudah sampai tahap depresi atau belum," jelas Gardin, mengutip

siaran pers ITB, Jumat (22/4).

Adapun alat yang dirancang ini memiliki akurasi di angka 90 persen. Hasil alat ini dikalibrasi dengan tes BDI (Beck Depression Inventory), yang saat ini umum digunakan di kedokteran jiwa.

Sehingga terdapat 3 level penderita depresi, yakni rendah, sedang, dan berat.

Adapun inovasi ini bermula dari pengembangan tugas yang dikerjakan Yudha saat menjalani Tahap Persiapan Bersama (TPB) di SITH ITB.

Sama dengan TPB, namun alatnya baru bisa dibuat saat tahun kedua perkuliahan, yang di mana waktu tersebut banyak diisi oleh kegiatan orientasi atau ospek jurusan.

Selain itu, mereka juga merasa saat itu wawasan yang mereka miliki masih dasar. Ditambah lagi, masa pandemi membuat kegiatan ini tak bisa dilakukan di laboratorium, yang akhirnya menghambat proses pengambilan data dan analisis.

"Tapi dari proses ini kita bisa belajar lebih jauh tentang ke depannya, sampai rasanya habis presentasi itu kami zseperti habis selesai sidang," cerita Gardin.

Berbagai kendala juga dihadapi oleh kelompok ini dalam proses perancangan alat yang mereka lakukan. Kendala utama yang dihadapi adalah transisi waktu yang mereka alami.

Adapun proposal dibuat saat masih TPB, namun alatnya baru bisa dibuat saat tahun kedua perkuliahan, yang di mana waktu tersebut banyak diisi oleh kegiatan orientasi atau ospek jurusan.

Selain itu, mereka juga merasa saat itu wawasan yang mereka miliki masih dasar. Ditambah lagi, masa pandemi membuat kegiatan ini tak bisa dilakukan di laboratorium, yang akhirnya menghambat proses pengambilan data dan analisis.

Beruntung kini proses

panjang berhasil dilalui, dan alat tersebut akhirnya bisa rampung.

Untuk pembagian tugas, Yudha bertugas membuat planning dan mengatur urusan sumber daya.

Gardin bertugas untuk urusan administrasi dan pembuatan laporan. Sementara Alifia dari Teknik Biomedis bertugas untuk membuat desain arduino, desain grafis, dan presentasi.

Tentunya, inovasi yang mereka ciptakan ini sangat diharapkan untuk bermanfaat bagi banyak orang di masa depan.

"Kami berharap alat ini akan ada disetiap fasilitas kesehatan Indonesia. Jadi orang yang memiliki masalah mental jadi lebih mudah untuk mengatasi dan menanggulangnya sehingga orang tersebut tidak perlu melalui berbagai hal rumit yang menghambat proses kesehatannya," tutup Gardin. ● tom

IDI Tegaskan Pentingnya Vaksin Kanker Serviks



JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Pertimbangan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof dr Zubairi Djoberan mengaskan betapa pentingnya vaksin kanker serviks atau Human Papilloma Virus (HPV) untuk keselamatan masyarakat. Pasalnya, sudah banyak korban kanker yang menyerang leher rahim ini.

"Isu vaksin HPV muncul dan ada saja gerakan antivaksin yang mengiringinya. Padahal, data observasi kanker dunia 2020 menunjukkan terdapat 21.003 kematian akibat kanker serviks di Indonesia," kata Zubairi dalam keterangan yang dikutip, Jumat (22/4).

Dia menjelaskan, lebih dari dua kematian terjadi setiap jam. "Sepertinya mereka memang tak peduli dengan data dan sains," kata Zubairi.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memastikan program imunisasi rutin, khususnya vaksin

HPV akan diberikan secara gratis mulai tahun ini. Pemberian vaksin ini dilakukan sebagai tindakan preventif dan promotif pemerintah dalam penerapan kebutuhan kesehatan dasar.

"Gratis, dibiayai oleh negara, (mulai) tahun ini. Semua yang dari program pemerintah tidak usah bayar," kata Budi di Jakarta, Selasa (19/4).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, pemberian vaksin HPV adalah untuk memberikan pencegahan akan terjadinya perburukan penyakit. Budi menekankan pemberian vaksin bukan untuk menyembuhkan.

"Karena memang kita mau melakukan itu tindakan yang terkait preventif dan promotif, seperti Covid-19 kalau kita sakit biayanya puluhan juta masuk RS, tapi kalau kita cegah preventif pakai masker minum vitamin itu kan jauh lebih murah, jadi vaksinasi itu kan sifatnya mencegah bukan mengobati orang sakit," kata Budi. ● tom

SAMBUNGAN

orang dari unsur swasta menjadi tersangka kasus itu bukan penentu kebijakan di perusahaan masing-masing. Menurutnya, ketiga tersangka tersebut hanya pelaksana kebijakan di lapangan dengan kewenangan terbatas.

"Tidak mungkin kebijakan itu diputuskan pada tingkatan GM atau seorang komisaris perusahaan. Kebijakan tersebut pasti dibuat perusahaan dan sepengetahuan para pemegang saham atau pemiliknya," kata Misbakhun.

DPR Dorong Kejagung Jerat Juga...

Legislator dari Partai Golkar itu mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali memberikan instruksi kepada jajaran menteri, aparat penegak hukum, TNI/Polri, gubernur, bupati/wali kota, dan semua pelaku bisnis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng.

Namun, ternyata ada pihak yang mengakali larangan ekspor CPO dengan memanfaatkan celah aturan melalui perizinan khusus. Oleh karena itu, dia mendorong Kejagung

menjerat korporasi pelanggar larangan ekspor CPO.

Menurutnya, tindakan tegas itu merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerantas mafia minyak goreng.

"Jadi, harus ada langkah yang lebih keras dari Kejaksanaan Agung untuk menetapkan pihak korporasi yang terkait dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan korporasi itu telah memengaruhi per-

ekonomian nasional sehingga negara harus menanggung banyak beban yang nilainya triliunan rupiah," ucapnya.

Misbakhun menyebut korporasi yang diduga terlibat kasus itu telah melakukan sabotase terhadap perekonomian nasional.

"Menurut saya mereka (korporasi) telah melakukan terorisme ekonomi. Sudah selayaknya mereka diminta ikut bertanggung jawab atas kejahatan tersebut," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan kelangkaan minyak goreng

DARI HAL 1

yang diikuti kenaikan harga di pasaran mengakibatkan arah kebijakan di APBN 2022 berubah. Sebab, pemerintah harus mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelompok masyarakat tertentu yang terpuak oleh kenaikan harga minyak goreng.

"Mahalnya harga minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah sampai harus mengalokasikan uang triliunan rupiah di APBN untuk memperbaiki daya beli," katanya. ● mar

Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada...

Pusat. "Video ini nanti juga sampai ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD sehingga berkeinginan menjadwalkan pertemuan dengan kami. Kalau tidak bersama seluruh keterangan lembaga terkait paling tidak dengan pak menteri," ujar salah satu pria dalam video itu, dilihat Jumat (22/4).

Mereka beranggapan, dengan diterapkannya khilafah, maka nasib Indonesia akan terselamatkan. Mereka juga berharap Mahfud dapat menginisiasi agenda simposium tersebut.

"Kalau bisa diindikasikan dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah ajaran Islam yang agung, yang akan menyela-

matkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Lebih baik sekali kalau Kemenko Polhukam bisa menginisiasi agenda itu," ucapnya.

Merespons video, Mahfud beranggapan hal itu adalah bagian dari penyampaian aspirasi.

Menurutnya, pihak yang menyampaikan narasi tersebut tak dapat membedakan antara sistem dan nilai kekhilafan.

"Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem, tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi," jelas Mahfud kepada wartawan.

Lebih lanjut disampaikan, dirinya kerap kali melangsungkan dialog dengan ormas Islam terkait sistem bernegara. Kata Mahfud, tak ada sistem khilafah Islam yang baku ber-

dasarkan fikih.

"Semua setuju bahwa sistem bernegara itu hasil ijthad yang selalu berbeda. Mengapa? Karena memang tidak ada. Coba tunjukkan kepada publik secara runut dan logis berdasar secara fikih, kapan dan dimana pernah ada sistem khilafah Islam yang baku? Carilah sejak zaman Abu Bakar sampai sekarang," ungkapnya.

Dia menilai, kelompok-kelompok itu bila dijelaskan maka hanya akan manggung-manggung saja.

Oleh karena itu, menyarankan mereka untuk mendatangi saja ormas Islam dan menunjukkan sistem bernegara mana yang baku menurut ajaran Islam.

Orang-orang ini pun kalau

diajak diskusi paling nanti hanya seperti yang lain dan bilang, 'oh begitu toh maksudnya'. Saya sarankan begini saja, datanglah ke Muhammadiyah, NU, MUI, dan ormas Islam dan tunjukkan mana sistem bernegara yang baku menurut Islam.

Ingat, kita bicara sistem, bukan nilai. Kalau soal nilai, anak Tsanawiyah juga tahu semua," katanya.

Mahfud pun meminta agar usulan pembahasan penerapan sistem khilafah disampaikan Parlemen dan Partai Politik (parpol). Sebab, mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik dengan proposal khilafah yang ditawarkan.

"Kedua, kalau soal aspirasinya ya salurkan ke parpol, DPR/MPR karena kalau men-

gusulkan perubahan sistem tempatnya ya di institusi-institusi tersebut. Mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik. Kan aktivis parpol Islam banyak tahu fikih dan usul fikih," jelasnya.

Tak hanya itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengusulkan agar pihak tersebut membentuk parpol sendiri saja. Lalu, mereka mengikuti pemilihan umum (Pemilu) agar bisa mengusulkan khilafah.

"Kalau tak ada parpol yang tertarik ya ikut pemilu sendiri saja. Buat parpol, lalu ikut pemilu. Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi karena dialog terbuka terus dilakukan. Saya kan sudah selalu terbuka dimanamana," ujarnya. ● han

Saat Pedagang Perempuan Ngadu ke Jokowi....

dipenjarakan. Bingung Bapak," ulang pedagang tersebut masih dalam tangisnya.

"Yang ditangkap siapa?" tanya Jokowi.

"Om kami menolak pungli ditangkap polisi," jawab pedagang itu lagi.

Jokowi kemudian meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga berada di lokasi untuk mencatat keluhan pedagang itu.

"Yang dipenjarakan siapa?" tanya Pramono ke si pedagang yang masih menangis.

"Namanya?" ulang Pramono.

"Ujang Sarjana Bapak. Mana mau Lebaran anaknya ada empat," kata pedagang itu lagi.

Pramono kembali mencatat keluhan pedagang tersebut Sementara Jokowi berkata,

"yaa...yaa," sambil menelungkupkan tangan memberi tanda jika aspirasi pedagang telah dicatat.

"Kami mohon Bapak bisa bantu kami. Hanya bapak yang bisa bantu kami," tambah pedagang itu.

"Bapak bisa bantu kami?" tanyanya lagi.

Sementara itu, laki-laki yang mendampingi pedagang itu mengucapkan terima kasih.

"Panjang umur Pak Jokowi. Om kami menolak pungli Pak. Kita punya bukti bukti semua Pak. Terima kasih banyak Pak," katanya.

Tanggapan Mabes Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Brigjen Ah-

mad Ramadhan mengatakan, kejadian itu sudah mendapatkan atensi dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar).

"Sudah diatensi oleh Polda Jabar," kata Ramadhan saat dihubungi, Jumat (22/4).

Ia tidak menjelaskan rincian atensi yang diberikan. Menurut Ramadhan, Humas Polda Jabar yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait itu.

"Nanti akan disampaikan Kabid (Kepala Bidang) Humas Jabar," ucapnya.

Kuasa hukum Ujang Sarjana dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Jumat (22/4), membeberkan sejumlah kejanggalan proses hukum terhadap kliennya.

Adapun kuasa hukum Ujang terdiri dari Emir al

Rangga Trenggono, Akhmad Hidayatullah, dan Parsiholan Marpaung.

Mulanya, Ujang menolak membayar pungli saat ketiga preman mendatangi Pasar Bogor, di Kota Bogor, Jawa Barat.

Mereka memaksa para pedagang membeli air minum yang mereka jual dengan harga yang sudah dinaikkan.

Mereka mengancam akan membacok pedagang yang tak membeli air minum.

Ujang lantas menegur mereka. Salah seorang preman bernama Jupri hendak menyerang Ujang namun dihalangi oleh para pedagang lain dan keluarga Ujang.

Ketiga preman itu kemudian pergi karena kalah jumlah. Keesokan harinya, anggota

Bhabinkamtibmas dan Ketua RT mempertemukan Ujang dengan salah satu preman yang terlibat keributan di Pasar Bogor, yakni Andriansyah.

Dalam pertemuan itu, Andriansyah tiba-tiba menyodorkan hasil rontgen dengan biaya Rp 1.300.000.

Ia mengklaim hasil rontgen itu menunjukkan luka akibat pukulan dari Ujang.

Ujang dan keluarga pun sontak menolak untuk membayar karena meyakini peristiwa pemukulan itu tidak ada.

Kemudian, pada 17 Januari 2022, Ujang didatangi oleh anggota polisi dari Polsek Bogor Tengah dengan maksud sekadar mengobrol.

Namun kemudian mereka menggiring Ujang ke Polsek Bogor Tengah dan Ujang ditahan hingga sekarang. ● mar

sabu adalah atasannya. Nia dan Ardi tetap divonis bersalah karena telah menyalahgunakan narkoba. Namun, mereka terbebas dari hukuman satu tahun penjara sebagaimana yang menjadi vonis majelis hakim di PN Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, mereka harus menjalani rehabilitasi selama delapan bulan. ● mar

Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie...

(PN) Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2011 Nomor 770/Pid.Sus/PN Jkt Pst mengenai amar putusan pada angka 2.

"Tanggal 29 Maret itu putusannya (bebas rehabilitasi). Rehabilitasi delapan bulan. Sudah inkrah," ujar kuasa hukum Nia, Wa Ode Nur Zainab, saat dihubungi, Jumat (22/4).

Menurut Wa Ode, apabila berdasarkan penghitungan

sejak menjalani rehabilitasi, keputusan ini lebih beberapa minggu dari yang semestinya keluar pada 10 Maret 2022.

"Kalau hitung-hitungan tanggal, (rehabilitasi) delapan bulan itu berada di 10 Maret 2022. Sedangkan putusan itu 29 Maret artinya keputusan itu sudah melewati delapan bulan," kata Wa Ode.

"Tetapi, kalau bilang bulan,

tetap delapan bulan karena Maret itu dari tanggal 1 sampai 30. Artinya, tidak salah juga bilang delapan bulan, tetap (bebas rehabilitasi) di bulan Maret," ucap Wa Ode.

Sebagai informasi, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekitar

Juli 2021 lalu.

Selain Nia dan Ardi, polisi juga menangkap sopir pribadi keduanya, Zen Vivanto. Polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram beserta bong (alat pengisap sabu).

Penyalahgunaan narkoba Nia dan Ardi terbongkar setelah polisi menggeledah Zen Vivanto. Zen Vivanto kemudian menunjukkan bahwa pemilik

sabu adalah atasannya. Nia dan Ardi tetap divonis bersalah karena telah menyalahgunakan narkoba. Namun, mereka terbebas dari hukuman satu tahun penjara sebagaimana yang menjadi vonis majelis hakim di PN Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, mereka harus menjalani rehabilitasi selama delapan bulan. ● mar

Persahabatan Unik Seorang Pria...

dan dia mengambilnya. Saya menawarkannya api dan dia tampak menganggukkan kepalanya," ujarnya.

"Setelah itu, jika saya keluar dari belakang untuk

merokok, ia akan turun untuk bergabung dengan saya dan mencoba mengambil rokok," ungkapnya.

Burung itu juga biasa hinggap di putri Pete, Phoebe,

tujuh, dan putranya Austin, lima, dan membiarkan mereka memberinya makan.

Pete, dari Bexhill, East Sussex, belum melihat Craig sejak Oktober tahun lalu.

"Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi mungkin rokok yang membunuhnya," ujarnya.

Pete telah mengubah lebih dari 6.000 gambar bu-

rung gagal yang diambilnya menjadi koleksi karya seni NFT dan bahkan menjadikannya akun Twitternya sendiri bernama @IamCrypto Craig. ● osm

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularto.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularto.
ARTISITIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen). **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jeffri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA, MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KUANGGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500,-/eks (di luar kota Rp 3.000,-/eks), Harga Langganan Rp 50.000,-/Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639 7652.
 Twitter: International Media @redaksi_IM